

**“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PENERAPAN
KEADILAN RESTORATIF TERHADAP KORPORASI
SEBAGAI SUBJEK TINDAK PIDANA”**

TESIS

Oleh

LAMGOK HERYANTO SILALAH
(2202190095)



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2025**

**“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PENERAPAN KEADILAN
RESTORATIF TERHADAP KORPORASI SEBAGAI SUBJEK TINDAK PIDANA”**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Program Magister
Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia

Oleh

LAMGOK HERYANTO SILALAH

(2202190095)



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2025**



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lamgok Heryanto Silalahi

NIM : 2202190095

Program Studi : Magister Hukum

Fakultas : Program Pascasarjana

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF TERHADAP KORPORASI SEBAGAI SUBJEK TINDAK PIDANA":

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.



Lamgok Heryanto Silalahi
NIM: 2202190095



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

**“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PENERAPAN KEADILAN
RESTORATIF TERHADAP KORPORASI SEBAGAI SUBJEK TINDAK
PIDANA”**

Oleh:

Nama : Lamgok Heryanto Silalahi

NIM : 2202190095

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tesis guna mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 14 November 2024

Menyetujui,

Pembimbing I

Dr. Drs. Tatok Sudjiarto, S.H., M.H., M.T.L.
NIP/NIDK: 211036/8931720021

Pembimbing II

Dr. Fernando Silalahi, S.T., S.H., M.H.
NIP/NIDN: 191643/0322117104

Ketua

Program Studi Hukum Program Magister

Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H.
NIP/NIDN: 191691/0305097105

Direktur

Program Pascasarjana

Prof. Dr. dr. Bernadeta Nadeak, M.Pd., PA.
NIP/NIDN: 001473/0320116402



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Pada tanggal 14 November 2024 telah diselenggarakan Sidang Tugas Akhir untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Strata Dua pada Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

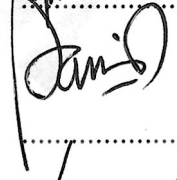
Nama : Lamgok Heryanto Silalahi

NIM : 2202190095

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana dan Penerapan Keadilan Restoratif terhadap Korporasi sebagai Subjek Tindak Pidana”** oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji	Jabatan Dalam Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Dr. Drs. Tatok Sudjiarto., S.H., M.H., M.T.L	Sebagai Ketua	
2. Dr. Fernando Silalahi., S.T., S.H., M.H.	Sebagai Anggota	
3. Dr. Djernih Sitanggang, Bc.IP., S.H., M.H.	Sebagai Anggota	



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA PROGRAM PASCASARJANA

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lamgok Heryanto Silalahi
NIM : 2202190095
Program Studi : Magister Hukum
Fakultas : Program Pascasarjana
Jenis Tugas Akhir : Tesis
Judul : **Pertanggungjawaban Pidana dan Penerapan Keadilan Restoratif terhadap Korporasi sebagai Subjek Tindak Pidana**

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbingan dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi mana pun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Non Eksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.



14 November 2024

Lamgok Heryanto Silalahi
NIM 2202190095

KATA PENGANTAR

Pertama-tama penulis ingin mengucapkan syukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena Kasih dan Anugerah-Nya sehingga penulis diberikan kesempatan untuk menyelesaikan tesis ini dengan baik. Penulis berharap, dengan karya tulis ini dapat memberikan sumbangan pemikiran serta memperkaya ilmu pengetahuan berkenaan dengan masalah “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF TERHADAP KORPORASI SEBAGAI SUBJEK TINDAK PIDANA”.

Pada kesempatan ini, penulis hendak menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga, kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Rasa hormat dan ucapan terima kasih hendak penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H.,M.H.,M.BA. selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Ibu Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd, PA selaku Direktur Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia.
3. Bapak Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. Bapak Dr. Drs. Tatok Sudjiarto, S.H., M.H., M.T.L selaku pembimbing tesis satu dan Bapak Dr. Fernando Silalahi, S.T., S.H., M.H. selaku pembimbing tesis dua, yang mana di tengah-tengah kesibukannya telah mengorbankan

waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan saran, masukan, serta perbaikan dalam proses penulisan tesis ini.

5. Seluruh dosen, staf pengajar, dan staf administrasi pada Program Studi Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam mata perkuliahan masing-masing serta membantu penulis dalam hal administratif dan kelengkapan teknis lainnya.
6. Keluarga penulis, Ayah TM. Silalahi dan Ibu D. Silitonga; serta Istri penulis Martini Simatupang, S.Kom dan kedua anak Ellena Bellvania Silalahi serta Raja Jose Martua Silalahi atas segala kasih sayang, motivasi dan doa kepada penulis untuk mencapai hasil terbaik.
8. Rekan-rekan penulis di Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah menjadi sahabat yang memberikan ide, inspirasi dan motivasi, serta semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Pada akhirnya penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang membantu selama masa perkuliahan dan penyusunan tesis dan penulis berharap agar Tesis ini dapat bermanfaat bagi perkembangan Ilmu hukum di Indonesia.

Jakarta, 21 Oktober 2024

Materai 10.000

Lamgok Heryanto Silalahi

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR.....	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR.....	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....	iv
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
D. Metode Penelitian.....	12
E. Orisinalitas Penelitian.....	13
F. Kerangka Teori dan Konseptual.....	16
1. Kerangka Teori	16
2. Kerangka Konseptual.....	26
G. Sistematika Penulisan.....	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	29
A. Pertanggungjawaban Pidana.....	29

B. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.....	36
1. Korporasi sebagai Subjek Tindak Pidana	36
2. Tindak Pidana Korporasi	39
3. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	41
C. Keadilan Restoratif.....	61
1. Keadilan Hukum	61
2. Keadilan Restoratif (<i>Restorative Justice</i>)	64

BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KORPORASI

SEBAGAI SUBJEK TINDAK PIDANA	69
A. Sejarah dan Perkembangan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	69
B. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia	76
1. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam KUHP Kolonial	76
2. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam KUHP Nasional	83
3. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Undang- Undang Khusus.....	90
C. Implementasi Pertanggungjawaban Korporasi sebagai Subjek Tindak Pidana di Indonesia	101
1. Tindak Pidana Korupsi PT Duta Palma Korporasi.....	101
2. Tindak Pidana Korupsi PT Nusa Konstruksi Enjiniring.....	102

3. Tindak Pidana Pencucian Uang PT Beringin Bangun Utama	103
D. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Beberapa Negara	105
1. Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Belanda	106
2. Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Amerika Serikat	109
3. Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Inggris	114
4. Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Prancis	116
BAB IV KEADILAN RESTORATIF TERHADAP KORPORASI SEBAGAI SUBJEK TINDAK PIDANA	119
A. Sanksi Pidana Bagi Korporasi berdasarkan KUHP Kolonial dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia	119
1. Sanksi Pidana Korporasi dalam KUHP Kolonial	120
2. Sanksi Pidana Korporasi dalam Peraturan Perundang-undangan Khusus di Indonesia	127
B. Sanksi Pidana bagi Korporasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional)	133
C. Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Keadilan Restoratif Bagi Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana	139

1. Paradigma Pemidanaan dengan Prinsip Keadilan Restoratif	139
2. Pemidanaan dengan Prinsip Keadilan Restoratif bagi Korporasi Subjek Tindak Pidana dalam KUHP Nasional	144
3. Tantangan dalam Implementasi Pemidanaan Korporasi dalam KUHP Nasional.....	153
BAB V PENUTUP	162
A. Kesimpulan.....	162
B. Saran.....	163
DAFTAR PUSTAKA.....	165



ABSTRAK

“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF TERHADAP KORPORASI SEBAGAI SUBJEK TINDAK PIDANA

Judul Tesis : Pertanggungjawaban Pidana dan Penerapan Keadilan Restoratif terhadap Korporasi sebagai Subjek Tindak Pidana

Kejahatan korporasi telah menjadi isu penting di tengah pesatnya perkembangan ekonomi global, di mana korporasi tidak hanya memberikan manfaat bagi perekonomian, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan. Seiring dengan perkembangan tersebut, kebutuhan akan sistem hukum yang mampu mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi semakin mendesak. Di Indonesia, perubahan besar terjadi dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) yang mengakui korporasi sebagai subjek tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan regulasi tersebut, serta meninjau penerapan keadilan restoratif dalam menyelesaikan kasus kejahatan yang melibatkan korporasi. Penelitian ini menggunakan Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Teori Keadilan Restoratif sebagai dasar analisis. Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi menyoroti bagaimana korporasi dapat dimintai tanggung jawab pidana atas tindakan yang dilakukan oleh pengurusnya, sementara Teori Keadilan Restoratif menekankan pentingnya pemulihan kerugian akibat tindak pidana, baik bagi korban maupun masyarakat. Dalam konteks ini, pendekatan keadilan restoratif menawarkan mekanisme alternatif yang lebih inklusif dan berfokus pada perbaikan, bukan semata-mata pada hukuman.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, di mana data sekunder seperti undang-undang, jurnal, dan teori hukum digunakan sebagai bahan analisis. Fokus utama terletak pada bagaimana penerapan KUHP Nasional dapat mengakomodasi pertanggungjawaban pidana korporasi secara lebih adil dan proporsional. Selain itu, penelitian ini juga meneliti efektivitas penerapan keadilan restoratif dalam konteks kejahatan korporasi, serta bagaimana mekanisme ini dapat menjadi solusi yang lebih manusiawi dan konstruktif dalam penanganan tindak pidana korporasi.

Upaya dalam mencapai keadilan restoratif dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana korporasi, seperti melalui pembayaran kompensasi, pemulihan lingkungan, dan dialog antara korban dan pelaku. Pendekatan lebih efektif dibanding pendekatan retributif yang hanya berfokus pada hukuman. Penelitian ini mengungkap tantangan dalam penerapan keadilan restoratif, terutama dalam mengidentifikasi tanggung jawab pengurus di dalam struktur korporasi serta memastikan bahwa korporasi benar-benar memenuhi kewajiban pemulihan. Pembaruan dalam hukum acara

pidana diperlukan untuk mengakomodasi penerapan keadilan restoratif dan pertanggungjawaban pidana korporasi yang lebih komprehensif.

Kata Kunci: Korporasi, subjek hukum pidana, KUHP Nasional



ABSTRACT

Title : Criminal Liability and the Application of Restorative Justice to Corporations as the Subject of Criminal Acts

Corporate crime has become an important issue in the midst of rapid global economic development, where corporations not only provide benefits to the economy, but also have the potential to have a negative impact on society and the environment. Along with these developments, the need for a legal system that is able to regulate corporate criminal liability is increasingly urgent. In Indonesia, a major change occurred with the enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP Nasional) which recognizes corporations as the subject of criminal acts. This study aims to analyze the changes in regulations, as well as review the application of restorative justice in resolving crime cases involving corporations. This study uses the Theory of Corporate Criminal Liability and the Theory of Restorative Justice as the basis for analysis. The Theory of Corporate Criminal Liability highlights how corporations can be held criminally responsible for actions committed by their managers, while the Theory of Restorative Justice emphasizes the importance of recovering losses due to criminal acts, both for victims and the community. In this context, the restorative justice approach offers an alternative mechanism that is more inclusive and focuses on reparation, rather than solely on punishment.

The research method used is normative juridical with a descriptive-analytical approach, where secondary data such as laws, journals, and legal theories are used as analysis materials. The main focus lies in how the implementation of the National Criminal Code can accommodate corporate criminal liability in a fairer and proportionate manner. In addition, this study also examines the effectiveness of the implementation of restorative justice in the context of corporate crime, as well as how this mechanism can be a more humane and constructive solution in handling corporate crimes.

Efforts to achieve restorative justice can make a significant contribution to redressing losses caused by corporate crimes, such as through compensation payments, environmental restoration, and dialogue between victims and perpetrators. The approach is more effective than the retributive approach that focuses only on punishment. This study reveals challenges in the implementation of restorative justice, especially in identifying the responsibilities of administrators within the corporate structure and ensuring that the corporation truly fulfills its recovery obligations. Reform in the criminal procedure law is needed to accommodate the application of restorative justice and more comprehensive corporate criminal liability.

Keywords: *Corporation, criminal law subject, National Criminal Code*